



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN MALINAU**

*Jl. Pusat Perkantoran Gedung B.1 Blok. C - Telp/Fax (0553) 21863
MALINAU*

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

DINAS : KEHUTANAN KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN : 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas Berkah dan RahmatNya, maka penulisan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Kehutanan untuk tahun Anggaran 2013 dapat diselesaikan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No.239/2003 yang merupakan penyempurnaan dari SK No.589/1999, LAKIP merupakan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi (RENSTRA).

Maka Laporan Akuntabilitas ini mencoba memaparkan dan memberi informasi mengenai Capaian Kinerja dan sebagai pertanggung jawaban Dinas Kehutanan tentang kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 dan sebagai bahan evaluasi kemajuan pelaksanaan program pembangunan Dinas Kehutanan.

Akhirnya kami berharap LAKIP ini dapat menjadi bahan masukan dan Evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang Kehutanan di tahun berikutnya.

Kepala Dinas,

Frent Tomi Lukas, S.Hut.
NIP. 19740729 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Lokus dan Fokus.....	2
BAB II	RENCANA STRATEGIS	
	A. Visi dan Misi	3
	B. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.....	6
	C. Kesimpulan Analisa Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisa Faktor Eksternal (KAFE).....	9
	D. Analisa SWOT Sebagai Penetapan Strategi Pengembangan Dinas Kehutanan	17
	E. Tujuan dan Sasaran	23
	F. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	25
	G. Strategi Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	29
	H. Rencana Kinerja Tahun 2013	31
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Evaluasi Kinerja	34
	B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	35

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sesuai dengan TAP MPR NO.XI/1998 dan UU NO.28/1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta Intruksi Presiden RI NO.7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan yang merupakan bagian unit pelaksana teknis dibidang kehutanan pada Pemerintah Daerah Otonomi Kabupaten Malinau. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya pada setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti dituangkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO.589/1999 & telah disempurnakan melalui SK Kepala LAN No. 239/2003, LAKIP merupakan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi (Dinas Kehutanan). Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 tahun 2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kehutanan dan melaksanakan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat & Propinsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Menelaah persiapan bahan penyusunan rencana program kerja Dinas Kehutanan,
- b. Membuat konsep rencana kerja Dinas Kehutanan,
- c. Mengkoordinasikan rencana kerja secara langsung kepada unit terkait untuk persiapan pembahasan dan penelaahan RKA Dinas Kehutanan,
- d. Menugaskan dan mengarahkan para Kepala Bidang dan Sekretaris pada Dinas Kehutanan untuk menyusun rencana program kerjanya masing-masing sesuai kebutuhan Dinas Kehutanan,
- e. Mengontrol kegiatan penyusunan rencana program kerja Dinas Kehutanan,
- f. Melaksanakan penetapan usulan rencana program kerja dan usulan rencana anggaran Dinas Kehutanan,
- g. Menerima dan menindaklanjuti revisi DIPA yang telah ditetapkan,

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan adalah:

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan Renstra 2012-2016 pada tahun pertama,
2. Sebagai pertanggung jawaban Dinas Kehutanan tentang kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013,
3. Sebagai bahan evaluasi kemajuan pelaksanaan program pembangunan Dinas Kehutanan.

C. Lokus & Fokus

Didalam penyusunan Renstra yang menjadi Lokus adalah Dinas Kehutanan, sedangkan fokusnya adalah terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan secara lestari dan berkelanjutan melalui pemanfaatan hutan dan lahan berdasarkan fungsi dan peruntukan sebagai penunjang kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat serta mendukung perekonomian Daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

1. V I S I

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi pemerintah Kabupaten Malinau “ **Terciptanya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman dan damai melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)**”, maka visi Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau adalah:

Menjadi Dinas Kehutanan yang andal dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara lestari dan partisipatif menuju kesejahteraan masyarakat desa

- 1 **Dinas Kehutanan yang andal** mengandung makna Menjadi Dinas Kehutanan yang mempunyai kemampuan yang lebih efektif efisien dalam pengelolaan sumber daya hutan dari pada yang lain.
- 2 **Pengelolaan Sumber Daya Hutan** mengandung makna Terselenggaranya pemanfaatan hutan berdasarkan peraturan yang berlaku, terpadu, dan berkeadilan untuk mencapai keseimbangan hasil dan manfaat.
- 3 **Hasil Hutan Kayu** mengandung makna Sumber daya alam yang berasal dari hutan yang berupa kayu.
- 4 **Hasil Hutan Bukan Kayu** mengandung makna Hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
- 5 **Lestari** mengandung makna Pemanfaatan sumber daya hutan berfungsi secara seimbang antara manfaat ekologi, sosial/budaya dan ekonomi yang berkelanjutan.
- 6 **Partisipatif** mengandung makna Keterlibatan peran serta masyarakat di sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.
- 7 **Kesejahteraan Masyarakat Desa** mengandung makna Kontribusi yang nyata dari sumber daya hutan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa.

2. M I S I

Untuk mewujudkan visi Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kehutanan Kabupaten malinau yaitu sebagai berikut:

- 1 **Melaksanakan Perencanaan Hutan yang efektif dan efisien guna mendukung Program Gerakan Desa Membangun dan Program Departemen Kehutanan**
- 2 **Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu secara profesional**
- 3 **Melaksanakan Perlindungan dan Pembinaan Sumber Daya Hutan menurut prinsip-prinsip Konservasi**
- 4 **Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dan sarana pendukung aparatur Dinas Kehutanan**

Nilai-nilai :

Untuk melaksanakan misi dalam pencapaian visi telah ditetapkan nilai-nilai sebagai berikut:

- 1 ***Togetherness***, bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri
- 2 ***Willingness***, kesediaan bekerjasama berdasarkan persahabatan atau kooperatif
- 3 ***Inovatif***, menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi
- 4 ***Organizational***, perilaku secara orgazitional yakni interaksi satu sama lain dalam memecahkan masalah ataupun krisis
- 5 ***Respect***, rasa hormat kepada orang lain, saling menghormati, serta menghargai terhadap sesama
- 6 ***Wisdom***, kearifan, kearifbijaksanaan: sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip keseimbangan/kehamonisan antara rasionalitas dan moralitas, otak kiri dan otak kanan.

B. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

Setelah visi dan misi ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap *lingkungan strategis*. Dalam literatur tentang perencanaan strategis, Whittaker (1993) menyebut faktor-faktor dalam lingkungan strategis itu sebagai ***Faktor-faktor kunci keberhasilan*** (*critical succes factors*). Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa: potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan kendala yang dihadapi, termasuk didalamnya sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana, peraturan dan perundang-undangan, serta peraturan pemerintah pada umumnya.

Untuk memudahkan penyusunan formulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan, maka dalam analisis lingkungan strategis ini digunakan instrumen analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategis, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian perencanaan strategis (Strategic Planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisa SWOT.

Analisa SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan faktor internal kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses).

1. Perencanaan Lingkungan Internal

Dalam kenyataan, setiap institusi memiliki kondisi internal yang mendorong atau sebaliknya menghambat pengembangan misinya. Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Kehutanan diarahkan pada: (a) Dukungan semua infut pokok yang dibutuhkan oleh Dinas Kehutanan; (b) Proses atau strategi pengolahan atau pemanfaatan infut tersebut; (c) hasil yang diperoleh selama ini; dan (d) Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil. Segenap asset yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan disebut sebagai faktor internal. Didalamnya mencakup: SDM, Struktur Organisasi, dan Bangunan Kantor serta Sekolah. Adapun faktor internal Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

Tabel 1 : Faktor-faktor Internal

No.	Kekuatan (Strength)	No.	Kelemahan (Weakness)
1.	Sudah tertatanya Struktur Organisasi yang Kapabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan	1.	Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap IPK/IUPHHK
2.	Tersusunnya Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepala SKPD, Sekretaris, Bidang hingga Seksi-seksi	2.	Belum dilaksanakannya publikasi data dan informasi Kehutanan
3.	Tersedianya jumlah SDM yang memadai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	3.	Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM Dinas Kehutanan
4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Prakondisi Hutan	4.	Terbatasnya informasi terkini tentang sarana dan prasarana prakondisi Hutan
5.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran yang memadai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	5.	

2. Pencermatan Lingkungan Eksternal

Dalam mengemban misinya, Dinas Kehutanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal. Karena itu perlu dianalisis semua peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan, yang juga berpotensi menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat pencapaian misi.

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

Tabel 2 : Faktor-faktor Eksternal

No.	Peluang (Opportunity)	No.	Ancaman (Threats)
1.	Difokusnya salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan sebagai model Pembangunan Kabupaten Malinau (Kabupaten Konservasi)	1.	Belum ada payung hukum dari pemerintah Pusat terhadap terbentuknya Kabupaten Konservasi dan masih kurangnya sosialisasi mengenai konservasi sampai akar rumput
2.	Teralokasinya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Dana Bagi Hasil sektor Kehutanan Dana Reboisasi - Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2007 - PP.5 Tahun 2005	2.	Kurangnya pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pengurusan Hutan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau kepada UPTD Propinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Kehutanan
3.	Tertatanya Kawasan Hutan yang padu serasi guna pemanfaatan kawasan dalam pembangunan daerah	3.	Kurangnya dan belum memadai tenaga PolHut dalam mengawasi semua kegiatan Kehutanan di lapangan
4.	Terciptanya peluang usaha disektor Kehutanan yang lestari hasil dan manfaat dalam meningkatkan perekonomian daerah	4.	Masih minimnya pelaksanaan kegiatan inventarisasi data potensi sumber daya hutan

5.	Meningkatnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan Hasil Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (<i>Gran Specific</i>)	5.	Belum optimalnya penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan dalam kegiatan pembangunan kehutanann
6.	Meningkatnya kerjasama lembaga internasional dan dengan Kabupaten Malinau dalam mengatasi <i>Climate Change</i>	6.	Meningkatnya emisi dari laju Degradasi dan Deforestasi Hutan
7.	Terciptanya potensi ekowisata sebagai daya tarik kabupaten konservasi dan upaya peningkatan daya dukung lingkungan PAD	7.	Pemanfaatan data dan informasi kehutanan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum
8.	Terciptanya produk unggulan hasil hutan bukan kayu sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa	8.	Berkurangnya dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi Dinas Kehutanan
9.	Tersedianya data dan informasi bidang kehutanan untuk menarik pihak ketiga (investor/kunjungan wisatawan)	9.	Menurunnya keanekaragaman hayati sebagai potensi ekowisata Kabupaten

Tujuan dari pencermatan lingkungan strategis ini adalah untuk menguasai kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki menuju tujuan yang ingin dicapai.

C. Kesimpulan Analisa Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisa Faktor Eksternal (KAFE)

Melalui pencermatan lingkungan internal dan eksternal diperoleh faktor-faktor kekuatan,kelemahan,peluang dan tantangan serta selanjutnya dilakukan analisis KAFI dan KAFE dengan memberikan bobot, nilai dan tertimbang untuk memperoleh urutan prioritas sabagai berikut:

Tabel 3. Penentuan Score Analisa Faktor Internal (KAFI)

No	ANALISA LINGKUNGAN	Bobot	Nilai	Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL			
A	KEKUATAN			
	1 Sudah tertatanya Struktur Organisasi yang Kapabel dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan	30	3	90
	2 Tersusunnya Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepala SKPD, Sekretaris, Bidang hingga Seksi-seksi	20	3	60
	3 Tersedianya jumlah SDM yang memadai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	20	2	40
	4 Tersedianya sarana dan prasarana prakondisi hutan	10	3	30
	5 Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran yang memadai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	20	2	40
	Sub Jumlah	100		260

B	KELEMAHAN			
	1 Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap IPK/IUPHHK	30	2	60
	2 Belum dilaksanakannya publikasi data dan informasi kehutanan	30	2	60
	3 Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM Dinas Kehutanan	20	2	40
	4 Terbatasnya informasi terkini tentang sarana dan prasarana prakondisi hutan	20	3	60
	Sub Jumlah	100		220

Tabel 4. Penentuan Score Analisa Faktor Eksternal (KA FE)

No	ANALISA LINGKUNGAN	Bobot	Nilai	Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PELUANG			
	1 Difokuskannya salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan sebagai model pembangunan Kabupaten Malinau(Kabupaten Konservasi)	10	2	20
	2 Teralokasinya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Dana	10	2	20

	<p>Bagi Hasil sektor Kehutanan Dana Reboisasi</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2007</p> <p>- PP.5 Tahun 2005</p>			
3	Tertatanya kawasan hutan yang padu serasi guna pemanfaatan kawasan dalam pembangunan daerah	15	2	30
4	Terciptanya peluang usaha di sektor kehutanan yang lestari hasil dan manfaat dalam meningkatkan perekonomian daerah	15	2	30
5	Meningkatnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan Hasil Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Gran Specific)	10	2	20
6	Meningkatnya kerjasama lembaga internasional dan dengan Kabupaten Malinau dalam mengatasi Climate Change	10	2	20
7	Terciptanya potensi ekowisata sebagai daya tarik Kabupaten Konservasi dan upaya peningkatan daya dukung lingkungan dan PAD	10	2	20
8	Terciptanya produk unggulan hasil hutan bukan kayu sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa	10	2	20

	9 Tersedianya data dan informasi bidang kehutanan untuk menarik pihak ketiga (investor/kunjungan wisatawan)	10	2	20
	Sub Jumlah	100		220
B	ANCAMAN			
	1 Belum ada payung hukum dari pemerintah pusat terhadap terbentuknya Kabupaten Konservasi dan masih kurangnya sosialisasi mengenai konservasi sampai akar rumput	10	3	30
	2 Kurangnya pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pengurusan hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau kepada UPTD Propinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Kehutanan	10	2	20
	3 Kurangnya dan belum memadai tenaga PolHut dalam mengawasi semua kegiatan kehutanan di lapangan	10	2	20
	4 Masih minimnya pelaksanaan kegiatan inventarisasi data potensi Sumber Daya Hutan	10	3	30

5	Belum optimalnya penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan dalam kegiatan pembangunan kehutanan	20	3	60
6	Meningkatnya emisi dari laju Degradasi dan Deforestasi hutan	10	3	30
7	Pemanfaatan data dan informasi kehutanan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum	10	2	20
8	Berkurangnya dukungan pemerintah pusat, propinsi, daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi Dinas Kehutanan	10	2	20
9	Menurunnya Keanekaragaman hayati sebagai potensi ekowisata Kabupaten	10	3	30
	Sub Jumlah	100		260

Keterangan :

Bobot 100 = merupakan nilai total dari jumlah kriteria pada setiap elemen SWOT

Nilai 1 = Rendah, Kurang berpengaruh, Kurang baik

Nilai 2 = Sedang, Cukup, Berpegaruh, Baik

Nilai 3 = Sangat baik, Tinggi, Baik, Sangat berpengaruh

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai-nilai sebagai berikut

* Kekuatan = 260

* Kelemahan = 220

* Peluang = 220

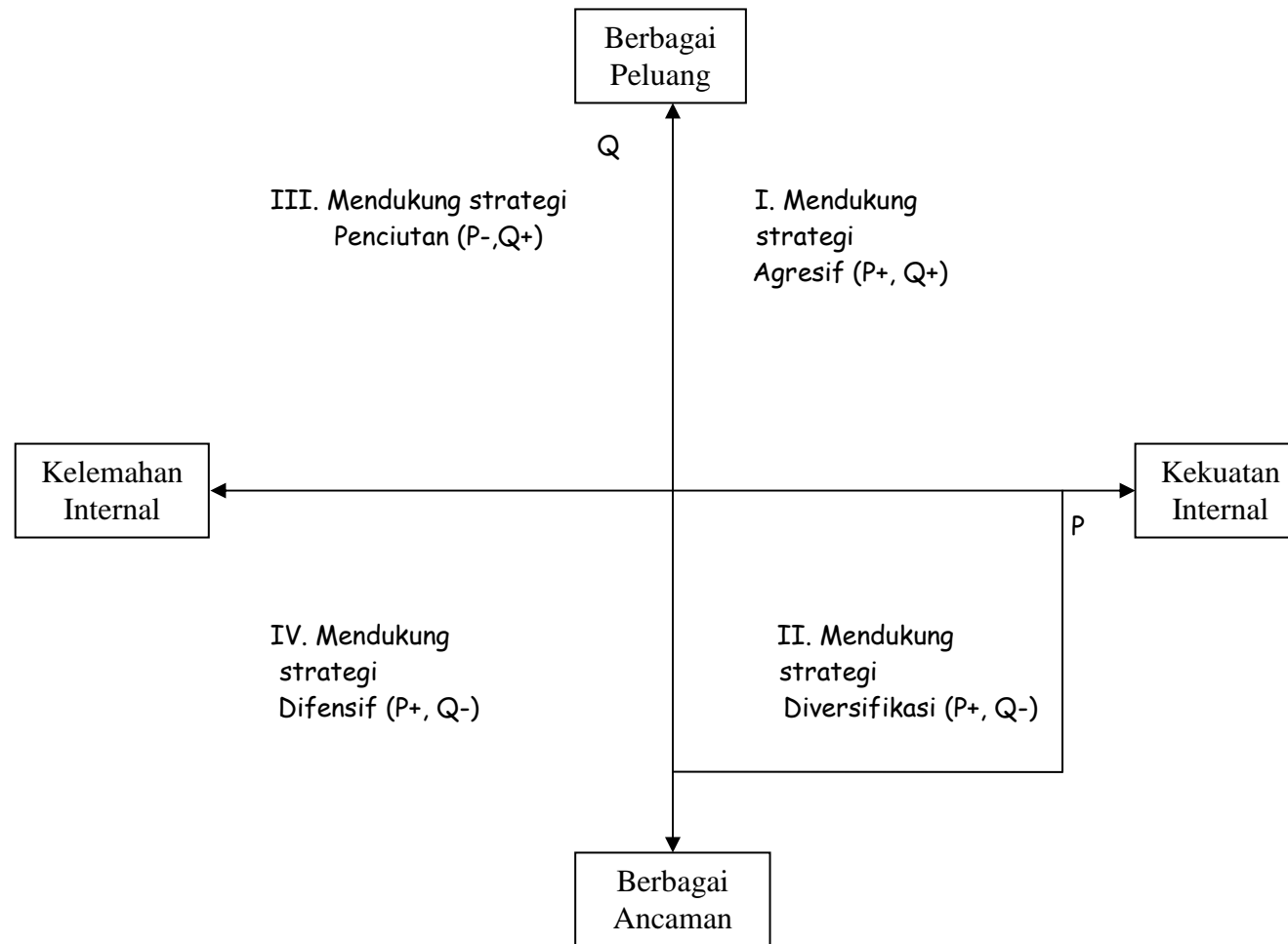
* Ancaman = 260

Nilai score yang dihasilkan pada masing-masing faktor ALI-ALE tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode berikut :

Tabel 5. Metode Penarikan Kesimpulan

No	Element	Nilai
I	Kekuatan	260
II	Kelemahan	220
III	Peluang	220
IV	Ancaman	260
V	(Kekuatan-Kelemahan)	+ 40
VI	(Peluang-Ancaman) / Q	- 40

Berdasarkan titik-titik tersebut dapat diproyeksikan dalam suatu diagram berikut guna mengambil suatu kesimpulan dalam menetapkan strategi yang harus diterapkan.



Gambar 1. Diagram Penentuan Posisi dan Strategi Dinas.

Berdasarkan posisi tersebut maka strategi yang harus diterapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau adalah strategi **Diversifikasi**, artinya meskipun organisasi (Dinas Kehutanan) memiliki berbagai ancaman namun masih memiliki kekuatan dari segi internal, sehingga strategi yang harus dilakukan adalah menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang jangka panjang dengan cara melalui perluasan/pengembangan produk/jasa seperti ekowisata dan perebutan pasar/minimarket bagi pengembangan produk hasil hutan non kayu di pasar internasional.

D. Analisa SWOT sebagai indikator penetapan strategi pengembangan Dinas Kehutanan

Berdasarkan kesimpulan analisa faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAFE), selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa SWOT sebagai penetapan strategi pengembangan Dinas Kehutanan.

Tabel 6. Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah tertatanya Struktur Organisasi yang kapabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan 2. Tersusunnya tugas pokok dan fungsi dari Kepala SKPD, Sekretaris, Bidang hingga Seksi-seksi 3. Tersedianya jumlah SDM yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD 4. Tersedia sarana dan prasarana prakondisi hutan 5. Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran yang memadai dalam pelaksanaan tugas poko dan fungsi 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap IPK/IUPHHK 2. Belum dilaksanakannya publikasi data dan informasi Kehutanan 3. Belim optimalnya pengembangan kapabilitas SDM Dinas Kehutanan 4. Terbatasnya informasi terkini tentang sarana dan prasarana prakondisi hutan
	<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p>	

<p>1. Difokuskannya salah satu tugas dan fungsi Dinas Kehutanan sebagai model pembangunan Kabupaten Malinau (Kabupaten Konservasi)</p>	<p>Menerapkan Profesionalisme pelayanan dan kinerja SKPD</p>	<p>Mengembangkan/diversifikasi kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan</p>
<p>2. Teralokasinya dana untuk kegiatan Rehabilitasi hutan dan Lahan melalui Dana Bagi Hasil sektor kehutanan Dana Reboisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2007 - PP.5 Tahun 2005 	<p>Revitalisasi perijinan sektor kehutanan</p>	<p>Optimalisasi sumber daya manusia bidang kehutanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</p>
<p>3. Tertatanya kawasan hutan yang padu serasi guna pemanfaatan kawasan dalam pembangunan daerah</p>	<p>Mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga (Masyarakat, LSM dan Swasta)</p>	<p>Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait</p>
<p>4. Terciptanya peluang usaha disektor kehutanan yang lestari hasil dan manfaat dalam meningkatkan perekonomian daerah</p>	<p>Revitalisasi IPTEK tepat guna dalam operasionalisasi pendataan penerimaan daerah dan publikasi pemanfaatan hasil hutan</p>	<p>Pemanfaatan data-data sektor kehutanan secara efektif dan efisien</p>
<p>5. Meningkatnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hasil Hutan Kayu</p>		

<p>Dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Gran Specific)</p> <ol style="list-style-type: none">6. Meningkatnya kerjasama lembaga internasional dan dengan Kabupaten Malinau dalam mengatasi <i>Climate Change</i>7. Terciptanya potensi ekowisata sebagai daya tarik kabupaten konservasi dan upaya peningkatan daya dukung lingkungan dan PAD8. Terciptanya produk unggulan hasil hutan bukan kayu sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa9. Tersedianya data dan informasi bidang kehutanan untuk menarik pihak ketiga (investor/kunjungan wisatawan		
--	--	--

TANTANGAN/ANCAMAN (T)		
<p>1. Belum ada payung hukum dari pemerintah pusat terhadap terbentuknya Kabupaten konservasi dan masih kurangnya sosialisasi mengenai konservasi sampai akar rumput</p>	<p>Mempertahan daya dukung lingkungan hidup</p>	<p>Revitasi peraturan daerah di bidang kehutanan</p>
<p>2. Kurangnya pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pengurusan hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau kepada UPTD Propinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Kehutanan</p>	<p>Meningkatkan manajemen lingkungan hidup</p>	<p>Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan kehutanan</p>
<p>3. Kurang dan belum memadai tenaga PolHut dalam mengawasi semua kegiatan kehutanan di lapangan</p>	<p>Mengembangkan jaringan pemasaran</p>	
<p>4. Masih minimnya pelaksanaan kegiatan inventarisasi data potensisumber daya hutan</p>	<p>Mengembangkan agribisnis dan agropolitan berbasis komoditi unggulan</p>	

<p>5. Belum optimalnya penggunaan Dana Bagi Hasil sumber daya hutan dalam kegiatan pembangunan kehutanan</p> <p>6. Meningkatnya emisi dan laju degradasi dan deforestasi hutan</p> <p>7. Pemanfaatan data dan informasi kehutanan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum</p> <p>8. Berkurangnya dukungan pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi kehutanan</p> <p>9. Menurunnya keanekaragaman hayati sebagai potensi ekowisata kabupaten</p>		
---	--	--

E. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih bahagia, lebih aman, lebih nyaman dan lebih damai yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin damai yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

- 1 Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil;
- 2 Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau;
- 3 Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
- 4 Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Maka tujuan Dinas Kehutanan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Memantapkan Perencanaan kawasan hutan yang selaras dengagn RTRW Kabupaten Malinau.
- 2 Meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara lestari.
- 3 Mewujudkan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
- 4 Menjaga keanekaragaman hayati sebagai komoditi unggulan desa.
- 5 Meningkatkan fungsi jasa lingkungan melalui penurunan emisi sebagai pendapatan asli daerah.

- 6 Meningkatkan SDM kehutanan yang bersertifikat dan profesional.
- 7 Meningkatkan pelayanan di bidang kehutanan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness*).

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semester, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau diutamakan pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur yang mampu mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1 Terlaksannya tata batas baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- 2 Terlaksananya inventarisasi kawasan hutan baik di hutan lindung dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 3 Terlaksananya pengawasan terhadap perencanaan hutan.
- 4 Tersusunnya rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan.
- 5 Terjaganya kawasan hutan.
- 6 Terlaksananya penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan/penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan, serta pengawasan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

- 7 Terlaksananya pendataan DR-PSDH, IIUPH, GR-Tegakan untuk perhitungan Dana Bagi Hasil.
- 8 Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- 9 Terselenggaranya penurunan emisi dari degradasi dan deforestasi terhadap perubahan iklim.
- 10 Terbentuknya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan KPH.
- 11 Terbentuknya kelompok masyarakat yang berorientasi keanekaragaman hayati sebagai komoditi unggulan.
- 12 Terjalannya kerjasama pihak ketiga dalam memberikan pendanaan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- 13 Tersedianya petugas tenaga ahli yang bersertifikat.
- 14 Tersedianya peralatan penunjang bidang kehutanan.
- 15 Tersedianya teknologi dan informasi bidang kehutanan.

F. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan strategi Dinas kehutanan kabupaten Malinau menetapkan strategi sebagai berikut :

Tabel 7. Sasaran dan Strategi Dinas Kehutanan kabupaten Malinau

NO	SASARAN	NO	STRATEGI
1.	Terlaksananya tata batas baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dengan melibatkan pemangku kepentingan.	1.	Menjalin koordinasi dengan BPKH dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tata batas dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

2.	Terlaksananya inventarisasi kawasan hutan baik di hutan lindung dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).	2.	Melaksanakan inventarisasi hutan dengan sistem sampling.
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap perencanaan hutan.	3.	Melaksanakan pengawasan intensif.
4.	Tersusunnya rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan.	4.	Menyiapkan data-data kawasan lahan kritis.
5.	Terjaganya kawasan hutan.	5.	Menyiapkan data-data kawasan hutan.
6.	Terlaksananya penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan/penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan, serta pengawasan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.	6.	Meningkatkan pengendalian evaluasi dan pelaporan penatausahaan hasil hutan (PUHH) serta menetapkan standar operasional prosedur (SOP) penatausahaan hasil hutan (PUHH).
7.	Terlaksananya pendataan DR-PSDH, IIUPH, GR-Tegakan untuk perhitungan Dana Bagi Hasil.	7.	Pemuktahiran data secara periodik.
8.	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.	8.	Melatih kelompok masyarakat tentang pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
9.	Terselenggaranya penurunan emisi dari degradasi dan deforestasi terhadap perubahan iklim.	9.	Menetapkan lokasi-lokasi Demonstration Activity (DA).

10.	Terbentuknya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan KPH.	10.	Melakukan pendampingan pembentukan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat dan KPH.
11.	Terbentuknya kelompok masyarakat yang berorientasi keanekaragaman hayati sebagai komoditi unggulan.	11.	Melakukan pendekatan dan pendampingan bagi masyarakat desa.
12.	Terjalinya kerjasama pihak ketiga dalam memberikan pendanaan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan.	12.	Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga.
13.	Tersedianya petugas tenaga ahli yang bersertifikat.	13.	Menjalin koordinasi dengan penyelenggara diklat untuk peningkatan kapasitas SDM.
14.	Tersedianya peralatan penunjang bidang kehutanan.	14.	Mengidentifikasi peralatan yang diperlukan dan penunjang administrasi perkantoran.
15.	Tersedianya teknologi dan informasi bidang kehutanan.	15.	Mengembangkan teknologi dan sistem informasi kehutanan.

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kehutanan kabupaten Malinau

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR
1.	Terlaksananya tata batas baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dengan melibatkan pemangku kepentingan	1.	Jumlah peta
2.	Terlaksananya inventaisasi kawasan hutan baik di hutan lindung dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2.	Dokumen Potensi Hutan
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap perencanaan hutan	3.	Dokumen Pengawasan
4.	Tersusunnya rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan	4.	Dokumen Rencana Teknis
5.	Terjaganya kawasan hutan	5.	Dokumen kawasan hutan
6.	Terlaksananya penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan/penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan, serta pengawasan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	6.	Dokumen dan data PUHH hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
7.	Terlaksananya pendataan DR-PSDH, IIUPH, GR-Tegakan untuk perhitungan Dana Bagi Hasil	7.	Dokumen Dana Bagi Hasil
8.	Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	8.	Jumlah kelompok masyarakat yang terlatih
9.	Terselenggaranya penurunan Emisi dari Degradasi dan Deforestasi terhadap perubahan iklim	9.	Luas kawasan hutan konservasi dan menurunnya luas lahan kritis
10.	Terbentuknya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat dan KPH	10.	Luasan Hutan

11.	Terbentuknya kelompok masyarakat yang berorientasi pada budidaya dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai komoditi unggulan	11.	Jumlah kelompok masyarakat
12.	Terjalannya kerjasama pihak ketiga dalam memberikan pendanaan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan	12.	Jumlah pihak ketiga yang memberikan pendanaan
13.	Tersedianya petugas tenaga ahli yang bersertifikat	13.	Jumlah tenaga teknis/ahli
14.	Tersedianya peralatan penunjang bidang kehutanan	14.	Jumlah sarana dan prasarana
15.	Tersedianya teknologi dan informasi bidang kehutanan	15.	Jumlah teknologi dan informasi

G. Strategi Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Dinas Kehutanan menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan seperti dibawah ini.

1. Kebijakan

Strategis memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan padoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu Dalam Rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Kabupaten malinau memiliki 15 (lima belas) kebijakan, yaitu :

- 1) Proaktif dengan BPKH dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tata batas dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- 2) Pelaksanaan inventarisasi hutan.
- 3) Monitoring dan evaluasi perencanaan hutan.
- 4) Pemanfaatan teknologi dalam menyiapkan data-data.
- 5) Pemantapan kawasan hutan.

- 6) Menerapkan sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) dan standar operasional prosedur (SOP) penatausahaan hasil hutan (PUHH).
- 7) Menjalin kerjasama dengan pihak terkait.
- 8) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang manfaat hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- 9) Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja perubahan iklim.
- 10) Memberikan pelayanan maksimal dalam pembentukan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat dan KPH.
- 11) Penggunaan produk-produk lokal sebagai produk unggulan desa.
- 12) Meningkatkan intensitas kerjasama dengan pihak ketiga.
- 13) Pengikutsertaan tenaga teknis dalam pelatihan-pelatihan teknis kehutanan.
- 14) Peningkatan peralatan kerja dan penunjang administrasi perkantoran.
- 15) Penerapan teknologi dan sistem informasi kehutanan.

2. Program Operasional

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satuan rencana. Dinas Kehutanan kabupaten Malinau telah menetapkan 18 (enam) Program operasional, yaitu:

- 1) Perencanaan dan pemanfaatan hutan
- 2) Inventarisasi hutan
- 3) Pengawasan perencanaan hutan
- 4) Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan
- 5) Pengendalian, evaluasi dan penatausahaan hasil hutan (PUHH)
- 6) Penggunaan standar operasional Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan bidang peredaran dan produksi

- 7) Singkronisasi dan konsolidasi data DR-PSDH IIUPH, GR Tegakan
- 8) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
- 9) Perubahan iklim (Climate Change) dan rehabilitasi lahan kritis
- 10) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- 11) Pemanfaatan sumber daya hutan bukan kayu
- 12) Promosi nilai multi fungsi hutan dan kabupaten konservasi
- 13) Inventarisasi flora dan fauna
- 14) Kerjasama pihak ketiga
- 15) Peningkatan sumber daya manusia Dinas Kehutanan
- 16) Pelayanan administrasi perkantoran dan lapangan
- 17) Pemetaan hutan
- 18) Peningkatan informasi kehutanan dan teknologi

H. Rencana Kinerja Tahun 2013

Pada dasarnya rencana Kinerja (Performance plan) 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau selama tahun 2013 Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2013 semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan menjadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam rencana Kinerja 2013 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Iktisar target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Iktisar target Kinerja Dinas Kehutanan kabupaten Malinau

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013
1.	Penunjang Administrasi Pemerintah	Terlaksananya Pelatihan, Magang, serta kegiatan lainnya	1 Kegiatan
2.	Diklat Kehutanan	Terlaksananya Diklat Kehutanan	1 Kegiatan
3.	Pelatihan peningkatan Hasil Hutan Non Kayu	Masyarakat yang handal dan menguasai pengolahan Rotan	1 Kegiatan
4.	Penanaman Serentak Nasional Tahun 2013	Terlaksananya Program Pemerintah	1 Kegiatan
5.	Pelatihan SKAU untuk Kepala Desa	Terciptanya aparatur Kepala Desa yang dapat mengeluarkan SKAU	1 Kegiatan
6.	Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tersedianya data untuk Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Kegiatan
7.	Pembuatan Rancangan teknis Penghijauan	Tersedianya Data Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Kegiatan
8.	Pendampingan kegiatan percontohan REDD+	Terlaksananya operasional pengawasan pengembangan REDD di Kabupaten Malinau	1 Kegiatan
9.	Pelatihan Pengolahan Tumbuhan Obat	Tersedianya SDM yang dapat Pengolahan Tumbuhan Obat	1 Kegiatan
10.	Administrasi DAK	Terlaksananya Kegiatan RHL DAK dengan baik, tepat dan sesuai dengan hasil yang maksimal	1 Kegiatan
11.	Dana Pendamping DAK Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya Kegiatan RHL DAK dengan baik, tepat dan sesuai dengan hasil yang maksimal	1 Kegiatan
12.	Monitoring HPH/IUPHHK	Terlaksananya Tertib Administarsi dalam TUK	1 Kegiatan

13.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK	Terciptanya penghijauan Hutan dan Lahan Kritis	1 Kegiatan
14.	Fasilitasi Izin Pinjam Pakai Kawasan	Terselesaikannya Pengurusan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan jalan di Perbatasan	1 Kegiatan
15.	Rekonsiliasi DR dan PSDH	Pelaksanaan Pendataan DR-PSDH, IIUH, GR Tegakan untuk penghitungan Dana Bagi Hasil	1 Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau pada tahun 2012 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang ditetapkan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 10. Iktisar pencapaian masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategik Dinas Kehutanan Kab. Malinau	SU/SP	Pencapaian	
			Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Penunjang Administrasi Pemerintah	SU	√	-
2.	Kegiatan Diklat Kehutanan	SU	√	-
3.	Pelatihan Pengolahan Hasil Hutan Non Kayu	SU	√	-
4.	Penanaman Serentak Nasional Tahun 2013	SU	√	-
5.	Pelatihan SKAU untuk Kepala Desa	SU	√	-
6.	Perencanaan RHL Tahunan	SU	√	-
7.	Pembuatan Rancangan Teknis Penghijauan	SU	√	-
8.	Pemdampingan Kegiatan percontohan REDD+	SU	√	-
9.	Pelatihan pengolahan Tumbuhan Obat	SU	√	-
10.	Monitoring HPH/IUPHHK	SU	√	-
11.	Administrasi DAK Hutan	SU	√	-
12.	Dana Pendamping DAK Rehabilitasi Hutan dan Lahan	SU	√	-

13.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK	SU	√	-
14.	Fasilitasi Izin Pinjam Pakai Kawasan	SU	√	-
15.	Rekonsiliasi DR dan PSDH	SU	√	-

Rincian pengukuran kinerja, per kegiatan dan per sasaran dapat dilihat pada Lampiran Form Penetapan Kinerja (PK) dan Form pengukuran pencapaian Sasaran (PPS).

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari 15 (lima belas) kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2013, semuanya telah dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya capaian untuk masing-masing Kegiatan dapat dijelaskan pada bagian berikut:

1. Penunjang Administrasi Pemerintah

Untuk memenuhi standar SDM & Keahlian staf Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau melalui pelatihan, magang dan Kegiatan lainnya yang menunjang kinerja SKPD dengan pelayanan Administrasi dan telah tercapai 100 %.

2. Diklat Kehutanan

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah dengan diikutinya beberapa kegiatan Diklat Kehutanan yang melibatkan SDM pada Dinas Kehutanan, adapun diklat yang diikuti antara lain :

- Diklat SIG bagi Operator 1 Orang
- Diklat Pelatihan dan Penyegaran SIPUHH-Online 3 Orang
- Pelatihan Penyegaran WASGANISPHPL-PKB 3 Orang

- Pelatihan Teknis Pengukuran, perhitungan volume tegakan pohon dan Pohon Rebah (log) serta Pemahaman dan Penerapan Teknik Silvikultur Intensif (Silin) 2 Orang
- Pelatihan WASGANISPHPL - PKB 1 orang

3. Pelatihan Pengolahan Hasil Hutan Non Kayu

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah telah dilakukannya pengolahan Hasil Hutan Non Kayu berupa Rotan dari Pemanenan dan Pengawetan Rotan, dilaksanakan di Kabupaten yang dihadiri oleh narasumber dari BP2HP Samarinda dan diikuti Kecamatan yang memiliki potensi Hasil Hutan Non Kayu berupa rotan perwakilan dari kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan, kecamatan Malinau Barat, kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mentarang.

4. Penanaman Serentak Nasional tahun 2013

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah telah dilakukannya penanaman serentak Nasional pada bulan Nopember 2013 dilaksanakan di Areal Eks Tambang Batu Bara PT. BDMS Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan, dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah.

5. Pelatihan SKAU untuk Kepala Desa

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah terlaksananya Pelatihan SKAU untuk Kepala Desa yang diikuti oleh Kepala Desa dari Kecamatan Malinau Barat, Malinau Selatan Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan.

6. Perencanaan RHL Tahunan

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah untuk mengetahui tentang informasi rencana kegiatan yang akan datang meliputi Rantek, yang dilaksanakan di Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu.

7. Pembuatan Rencana Teknis Penghijuan

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah untuk memperoleh informasi tentang profil desa, kelompok tani, lokasi, titik koordinat yang dilaksanakan di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hilir.

8. Pendampingan kegiatan percontohan REDD+

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah telah dilakukannya kegiatan Perekrutan tenaga ahli, pendamping dan fasilitator Desa yang di laksanakan di Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan Dan pelaksanaan Investasi Cepat untuk masing-masing Desa di Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu, serta menghadiri undangan seminar dan workshop pengenalan REDD+ yang dilaksanakan di Samarinda, Balikpapan dan Jakarta.

9. Pelatihan Pengolahan Tumbuhan Obat

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah telah dilakukannya kegiatan Pelatihan pengolahan Tumbuhan Obat dilaksanakan di aula SLB Malinau dengan menghadirkan narasumber Balai Konservasi Sumber daya Hutan Kementerian Kehutanan diikuti peserta dari kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Mentarang.

10. Monitoring HPH/IUPHHK

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau melaksanakan program intensifikasi pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perusahaan yang masih aktif di Kabupaten Malinau, kegiatan ini dimaksud untuk untuk menjamin kelestarian dan fungsi hutan berupa produksi maupun ekologi. Keberhasilan/kegagalan kegiatan ini ditunjang oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia yang berpengalaman;
- b. Kebijakan yang mengatur tentang kewenangan pengolahan di bidang Kehutanan;
- c. Sarana dan Prasarana.

11. Administrasi DAK Hutan

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah terlaksananya Kegiatan Monitoring, dan Pengawasan sehingga pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK dapat berjalan lancar dan baik.

12. Dana Pendamping DAK Rehabilitasi Hutan

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK Kehutanan dengan tertib dan lancar, baik secara fisik maupun laporan administrasi dan keuangan.

13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah telah dilaksanakannya penanaman dan pengkayaan tanaman di Desa Pulau Sapi seluas 100 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 40.000 Btg (Gaharu dan MPTS), dan telah selesainya pembuatan persemaian di Desa Pulau Sapi seluas ± 0,5 Ha untuk menampung dan menyediakan bibit bagi masyarakat yang tidak terakomodir pada kegiatan RHL DAK.

14. Fasilitasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah telah dikeluarkannya ijin prinsip 350 KM untuk (1) satu Tahun.

15. Rekonsiliasi DR dan PSDH

Kegiatan ini telah tercapai 100 % dengan indikator pencapaian adalah menyerahkan data DR-PSDH dari perusahaan untuk Dana Bagi Hasil yang lebih lengkap dan akurat untuk penerimaan Dana Bagi Hasil ke propinsi, mencocokkan data DR-PSDH dan di tindaklanjuti pada acara Rekonsiliasi yang jadwalnya di tentukan oleh Kementerian Kehutanan, di laksanakan di Bali, Mataram, Bandung dan Batam.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. Nomor 589/IX/6/V/99 tanggal 20 september 1999 yang telah disempurnakan melalui SK kepala LAN nomor 293/2003.

Berbagai masalah yang cukup berat sebagai dampak dari krisis politik, krisis ekonomi dari krisis kepercayaan masih dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013 ini, sehingga mempengaruhi pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2013 ini, disamping itu terdapat kendala teknis dalam penyusunan Laporan LAKIP ini, dimana pelaksanaan kegiatan tahun 2013 belum didasarkan pada dokumen pokok-pokok kebijakan strategis pembangunan pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2013.

Meskipun demikian berkat kerja keras serta ketekunan Tim perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka Laporan LAKIP ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan VISI, MISI dan tujuan secara umum pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat berhasil dengan baik. Untuk pencapaian sasaran tahun 2013, dari 15 kegiatan yang telah ditetapkan semuanya dapat dicapai dengan baik.

Dengan LAKIP Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau Tahun 2013 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan roda Pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tim Penyusun